Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT URBAN: STUDI SOSIOLOGIS DI BANTARAN SUNGAI JAKARTA

Tri Widya Astuti

Universitas Indraprasta PGRI

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

widyaastuti0405@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi bertahan hidup masyarakat di kawasan informal bantaran sungai Jakarta melalui studi literatur. Fokus kajian adalah bagaimana modal sosial menjadi instrumen adaptasi utama di tengah tekanan pembangunan perkotaan yang bersifat eksklusif. Temuan literatur menunjukkan bahwa warga mengembangkan mekanisme ketahanan berbasis jejaring kekerabatan dan ekonomi solidaritas sebagai respon terhadap keterbatasan akses formal. Artikel ini menyimpulkan bahwa daya lenting komunitas merupakan manifestasi perlawanan sehari-hari terhadap komodifikasi ruang. Pemerintah disarankan untuk beralih dari paradigma penggusuran menuju pembangunan kolaboratif yang mengintegrasikan modal sosial warga guna menghindari disrupsi sosial akibat kebijakan relokasi yang bersifat *top-down*.

Kata kunci: Sosiologi Pembangunan, Strategi Bertahan Hidup, Masyarakat Informal, Jakarta, Modal Sosial, Urbanisasi, Resistensi Sehari-hari.

ABSTRACT

This study analyzes the survival strategies of communities in informal settlements along Jakarta's riverbanks through a literature review. It focuses on how social capital serves as a primary adaptation instrument amidst exclusive urban development pressures. The literature reveals that residents develop resilience mechanisms based on kinship networks and solidarity economies in response to limited formal access. This article concludes that community resilience manifests as "everyday forms of resistance" against the commodification of urban space. It is suggested that the government shift from an eviction paradigm toward collaborative development that integrates local social capital to prevent social disruption caused by top-down relocation policies.

***Keywords**: Development Sociology, Survival Strategies, Informal Settlements, Jakarta, Social Capital, Urbanization, Everyday Forms of Resistance.*

I. PENDAHULUAN

Jakarta sebagai kota megapolitan di negara berkembang menghadapi tantangan urbanisasi yang sangat kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali menjadi pendorong utama transformasi fisik kota, di mana pembangunan infrastruktur berskala besar diprioritaskan untuk mendukung investasi (Firman, 2004). Akibatnya, terjadi percepatan konversi lahan yang tidak hanya mengubah wajah kota, tetapi juga memicu ketegangan antara kebutuhan ruang bagi aktivitas ekonomi modern dan kebutuhan ruang hidup bagi masyarakat marginal.

Dalam kacamata sosiologi pembangunan, urbanisasi di Jakarta sering kali menciptakan pola ketimpangan struktural. Kelompok masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dianggap menempati kawasan informal yang melanggar tata ruang kota (Sztompka, 2004). Paradigma pembangunan yang cenderung bersifat *top-down* ini sering memandang pemukiman tersebut sebagai masalah fisik yang harus diselesaikan dengan penggusuran, tanpa melihatnya sebagai ruang hidup yang memiliki sejarah dan struktur sosial mendalam.

Kesenjangan akses terhadap sumber daya kota menjadi akar permasalahan yang semakin melebar. Sementara kelas menengah dan atas memiliki akses terhadap hunian formal yang memadai, masyarakat miskin kota terpaksa beradaptasi dengan kondisi hunian yang tidak menentu (Castells, 1992). Ketidakpastian akan tempat tinggal ini memaksa mereka untuk terus-menerus mencari strategi baru agar tetap bisa bertahan di tengah arus modernisasi yang mengancam keberlangsungan ekonomi mereka.

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai bukanlah entitas yang pasif. Meskipun menghadapi ancaman penggusuran, mereka membentuk apa yang disebut sebagai modal sosial untuk menjaga stabilitas komunitas (Putnam, 2000). Modal sosial ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ketika mekanisme pasar formal atau kebijakan pemerintah gagal menjangkau kebutuhan dasar mereka, seperti akses terhadap modal usaha maupun perlindungan ekonomi saat terjadi krisis.

Namun, modal sosial ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan strategi bertahan hidup yang adaptif. Warga sering kali melakukan apa yang dikategorikan oleh (Scott, 1985) sebagai bentuk resistensi sehari-hari (*everyday forms of resistance*). Strategi ini bukan berupa perlawanan fisik yang terbuka, melainkan tindakan-tindakan subtil untuk tetap bertahan di ruang kota, menjaga jaringan kekerabatan, dan mencari celah penghidupan di sektor informal di sekitar pusat ekonomi Jakarta.

Masalah utama yang muncul adalah ketika kebijakan pembangunan perkotaan justru merusak modal sosial tersebut. Komodifikasi ruang yang didorong oleh kepentingan properti sering kali mengabaikan "Hak atas Kota" (*Right to the City*) yang dimiliki oleh setiap warga, termasuk mereka yang bermukim di bantaran sungai (Harvey, 2003). Pembangunan yang hanya berfokus pada estetika dan nilai komersial tanah tanpa memperhitungkan keberlangsungan struktur sosial komunitas, berpotensi menciptakan disrupsi sosial yang mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif bagaimana masyarakat informal di bantaran sungai Jakarta mempertahankan eksistensi mereka melalui studi literatur. Dengan memadukan berbagai perspektif teoretis, kajian ini akan membedah mekanisme adaptasi sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pembangunan inklusif yang mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat miskin kota.

Melalui analisis ini, artikel ini akan menunjukkan bahwa ketangguhan masyarakat bantaran sungai bukan sekadar masalah kemiskinan, melainkan masalah pemenuhan hak asasi atas ruang hidup. Dengan memahami strategi bertahan hidup mereka, kita dapat menemukan jalan tengah antara tuntutan pembangunan kota yang modern dan perlunya menjaga keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Jakarta

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*). Data dikumpulkan melalui penelusuran pustaka terhadap buku, artikel jurnal internasional, dan laporan penelitian kredibel yang membahas sosiologi pembangunan, urbanisasi, dan strategi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

bertahan hidup masyarakat miskin kota di Indonesia, khususnya Jakarta. Analisis dilakukan dengan mensintesis berbagai teori sosiologi pembangunan dengan konteks empiris pembangunan di Jakarta untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pola adaptasi sosial yang terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Modal Sosial sebagai Instrumen Ketahanan

Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Jakarta sering kali diidentifikasi sebagai kelompok yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi. Namun, keterbatasan akses terhadap sektor formal tidak serta merta membuat mereka tidak berdaya. Menurut (Putnam, 2000), modal sosialyang mencakup kepercayaan, jaringan, dan norma timbal balik menjadi aset yang sangat berharga bagi kelompok yang terpinggirkan. Di Jakarta, modal sosial ini berfungsi sebagai "jaring pengaman" yang nyata bagi warga bantaran sungai.

Jejaring kekerabatan menjadi pilar utama dalam modal sosial ini. Banyak warga bantaran sungai merupakan migran yang datang ke Jakarta melalui saluran informasi dari keluarga atau kerabat yang sudah menetap lebih dulu. Hal ini menciptakan kantong-kantong pemukiman berdasarkan kesamaan asal daerah (Castells, 1992).. Jaringan ini memudahkan pendatang baru untuk mendapatkan akses tempat tinggal sementara dan informasi mengenai peluang kerja di sektor informal.

Praktik ekonomi solidaritas juga muncul sebagai respons terhadap ketidakmampuan warga mengakses perbankan formal. Sistem arisan dan pinjaman berbunga rendah antar tetangga menjadi instrumen vital dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Melalui sistem ini, uang yang berputar di dalam komunitas tetap terjaga dan membantu warga mempertahankan keberlangsungan hidupnya tanpa harus bergantung pada rentenir yang merugikan.

Selain itu, norma kepercayaan yang terbentuk di dalam komunitas bantaran sungai menciptakan lingkungan di mana bantuan tenaga kerja dapat diberikan tanpa harus dibayar dengan uang tunai. Misalnya, dalam situasi perbaikan rumah atau renovasi sederhana, tetangga sering kali membantu secara gotong royong. Hal ini merupakan bentuk pertukaran sosial yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mempererat kohesi sosial di tengah tekanan lingkungan (Sztompka, 2004).

Namun, penting untuk dicatat bahwa modal sosial memiliki keterbatasan struktural. Meskipun efektif untuk bertahan hidup sehari-hari, modal sosial tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah struktural yang lebih besar seperti kebijakan penggusuran berskala besar. Ketika intervensi pemerintah dilakukan tanpa melibatkan komunitas, jejaring yang telah lama terbentuk tersebut terancam hancur karena warga harus berpindah ke lokasi yang jauh dan terfragmentasi (Firman, 2004).

Secara sosiologis, keberhasilan komunitas bantaran sungai untuk tetap eksis membuktikan bahwa mereka bukan sekadar objek kemiskinan. Mereka adalah subjek yang aktif dalam mengelola sumber daya terbatas. Keberlanjutan strategi bertahan hidup ini sangat bergantung pada sejauh mana ruang interaksi sosial mereka dapat dipertahankan di tengah arus modernisasi kota.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

b. Resistensi Sehari-hari dan Adaptasi Ruang Hidup

Di balik narasi ketertiban kota, masyarakat bantaran sungai di Jakarta melakukan apa yang disebut sebagai *everyday forms of resistance*. (Scott, 1985) menjelaskan bahwa perlawanan tidak selalu berbentuk protes demonstratif, melainkan tindakan-tindakan kecil dan tersembunyi yang bertujuan untuk mempertahankan ruang hidup. Di Jakarta, ini terlihat dari bagaimana warga terus memperbaiki rumah mereka secara bertahap, meskipun berada di lahan yang secara legal tidak diakui pemerintah.

Adaptasi ruang menjadi kunci utama dalam strategi bertahan hidup ini. Bantaran sungai dipilih bukan karena keinginan mereka untuk hidup di lingkungan berisiko, melainkan karena aksesibilitasnya yang tinggi terhadap pusat kerja di kota. Kedekatan dengan pusat kegiatan ekonomi memungkinkan warga untuk meminimalisir biaya transportasi, yang merupakan pengeluaran terbesar bagi masyarakat miskin kota (Castells, 1992)..

Warga juga melakukan negosiasi sosial secara terus-menerus dengan aktor-aktor di sekitarnya. Ketika terdapat ancaman relokasi, warga sering kali menggunakan strategi diplomasi atau membangun aliansi dengan organisasi masyarakat sipil untuk menunda proses eksekusi. Langkah ini mencerminkan pemahaman mendalam warga terhadap birokrasi dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya untuk memperpanjang durasi tinggal di kawasan tersebut (Scott, 1985).

Pemanfaatan ruang sisa di perkotaan juga merupakan wujud adaptasi kreatif. Kolong jembatan atau pinggiran rel yang ditinggalkan oleh pembangunan formal segera diisi oleh aktivitas ekonomi informal. Ruang-ruang ini berfungsi sebagai tempat usaha, tempat penyimpanan barang bekas, atau area sosial bagi warga. Bagi mereka, tidak ada ruang yang tidak bernilai selama ruang tersebut dapat mendukung keberlangsungan hidup.

Strategi adaptasi ini sering kali dianggap sebagai "pelanggaran" oleh kebijakan tata ruang formal. Namun, dalam perspektif sosiologi, tindakan ini adalah upaya rasional untuk bertahan di tengah ketiadaan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat kelas bawah. Kegagalan sistem pembangunan untuk menyediakan hunian murah di pusat kota memaksa warga untuk "menciptakan" hunian mereka sendiri di ruang-ruang yang tersedia (Harvey, 2003)..

Pada akhirnya, perlawanan sehari-hari ini adalah cerminan dari kegigihan komunitas untuk tidak terpinggirkan lebih jauh. Ketika kebijakan pembangunan tidak mengakomodasi keberadaan mereka, warga secara mandiri terus mencari cara untuk tetap menjadi bagian dari ekonomi kota. Ketangguhan ini merupakan bukti bahwa mereka memiliki peran penting dalam roda ekonomi Jakarta, meskipun sering kali tidak diakui secara administratif.

c. Tantangan Komodifikasi Ruang dan Eksklusi Sosial

Masalah fundamental pembangunan di Jakarta adalah kecenderungan komodifikasi ruang yang sangat tinggi. (Harvey, 2003). menekankan bahwa tanah di kota-kota besar telah berubah menjadi aset investasi properti semata. Hal ini berdampak langsung pada warga bantaran sungai, di mana lahan yang mereka tempati memiliki nilai ekonomi tinggi bagi pengembang, sehingga keberadaan mereka dianggap sebagai hambatan bagi akumulasi modal.

Proses komodifikasi ini memicu eksklusi sosial yang bersifat struktural. Ketika lahan diubah menjadi apartemen mewah atau pusat perbelanjaan, masyarakat asli tergusur. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan basis

ekonomi dan jaringan sosial yang selama ini menopang hidup mereka. Ketidakmampuan untuk membayar harga hunian di kawasan yang sudah mengalami gentrifikasi memaksa mereka pindah ke pinggiran kota (Firman, 2004).

Eksklusi ini juga memperdalam kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di Jakarta, pembangunan infrastruktur seringkali hanya memfasilitasi mobilitas kelas menengah ke atas, sementara kebutuhan aksesibilitas kelas bawah diabaikan. Akibatnya, kelompok miskin kota semakin terisolasi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yang membuat mobilitas vertikal atau perbaikan ekonomi menjadi semakin sulit dicapai (Sztompka, 2004).

Pembangunan yang bersifat top-down juga cenderung mengabaikan aspirasi warga. Keputusan relokasi sering kali diambil tanpa dialog yang inklusif, yang berakibat pada penolakan warga atau kegagalan adaptasi di lokasi hunian baru (rumah susun). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan psikologis dan sosiologis warga yang terdampak (Castells, 1992)..

Lebih jauh, komodifikasi ruang ini merusak modal sosial yang telah dibangun selama puluhan tahun. Ketika sebuah komunitas dipaksa bubar karena relokasi, sistem kepercayaan dan jaringan kerjasama yang menjadi kunci ketahanan mereka akan hancur seketika. Pemulihan modal sosial di tempat baru membutuhkan waktu yang lama dan tidak selalu berhasil, sehingga warga rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan yang lebih dalam (Putnam, 2000).

Oleh karena itu, tantangan masa depan pembangunan Jakarta terletak pada kemampuan untuk mengintegrasikan kebutuhan akan modernisasi dengan hak-hak masyarakat marginal. Jika Jakarta ingin tumbuh menjadi kota yang inklusif, pendekatan pembangunan harus bergeser dari fokus profit ke fokus keadilan ruang, di mana setiap warga memiliki hak untuk hidup dan berkembang di kotanya sendiri (Harvey, 2003)

IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa strategi bertahan hidup masyarakat informal di bantaran sungai Jakarta merupakan manifestasi dari ketangguhan komunitas (*community resilience*) yang kompleks. Modal sosial, yang diwujudkan melalui jaringan kekerabatan dan ekonomi solidaritas, berfungsi sebagai jaring pengaman utama saat akses terhadap fasilitas formal tidak tersedia. Resistensi sehari-hari yang dilakukan warga bukan sekadar perlawanan pasif, melainkan upaya rasional untuk mempertahankan hak atas ruang di tengah arus komodifikasi lahan yang masif. Namun, daya tahan ini memiliki batas struktural; kebijakan pembangunan yang bersifat *top-down* dan mengabaikan keberadaan komunitas secara sosiologis berpotensi merusak modal sosial dan memicu eksklusi sosial yang lebih dalam.

b. Saran

Pembangunan perkotaan di Jakarta perlu melakukan pergeseran paradigma, dari pendekatan penggusuran yang mengutamakan nilai komersial tanah, menuju pendekatan pembangunan inklusif berbasis partisipasi komunitas.

- **Implementasi *In-Situ Upgrading*:** Pemerintah disarankan memprioritaskan penataan kawasan tanpa memindahkan warga ke lokasi yang jauh, guna menjaga keberlangsungan jaringan sosial dan akses ekonomi warga yang telah terbentuk.

- **Pengintegrasian Modal Sosial:** Kebijakan relokasi, jika memang diperlukan, harus dilakukan dengan metode kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif warga dalam perencanaan, serta memastikan bahwa nilai-nilai komunitas tetap terjaga di lokasi baru.
- **Pengakuan Ruang Informal:** Perlu adanya dialog kebijakan yang mengakui keberadaan sektor ekonomi informal sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi kota Jakarta, bukan sebagai hambatan pembangunan.
- **Penelitian Lanjutan:** Disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan studi longitudinal terhadap efektivitas model penataan kampung berbasis komunitas di Jakarta, guna mengevaluasi dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial warga.

DAFTAR PUSTAKA

Castells, M. (1992). *The Informational City: Economic Restructuring and Urban Development*. Wiley. https://books.google.co.id/books?id=wl7xuPLdcZAC

Firman, T. (2004). Major issues in Indonesia's urban land development. *Land Use Policy*, *21*(4), 347–355. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2003.04.002

Harvey, D. (2003). The right to the city. *International Journal of Urban and Regional Research*, *27*, 939–941. https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2003.00492.x

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon \& Schuster. https://books.google.co.id/books?id=rd2ibodep7UC

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press. https://books.google.co.id/books?id=wRcOEAAAQBAJ